

Tata Kelola Kolaboratif Melalui BUMDes dalam Pencapaian Desa Mandiri di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo

Resky Amalia. P¹

¹Universitas Pepabri Makassar

Corresponding Author: Resky Amalia. P, e-mail: reskyamalia04@gmail.com

Published: September , 2025

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan memahami peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam tata kelola kolaboratif untuk mendorong percepatan pencapaian desa mandiri di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan meliputi perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta warga. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan capaian antar desa berdasarkan dimensi IDM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes berperan penting dalam menggerakkan ekonomi desa melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hambatan utama meliputi keterbatasan manajerial, inovasi usaha yang rendah, partisipasi masyarakat terbatas, serta lemahnya kolaborasi dengan pihak eksternal. Namun, peluang strategis terbuka melalui potensi ekonomi lokal, budaya gotong royong, dukungan regulasi dan dana desa, program pendampingan, serta keterlibatan generasi muda dalam ekonomi digital. Analisis komparatif menunjukkan desa mandiri ditopang oleh nilai IKE yang tinggi, sementara desa maju masih lemah pada aspek ekonomi meskipun memiliki IKS dan IKL yang baik.

Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan kapasitas BUMDes, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi multipihak sebagai strategi percepatan desa mandiri yang berkelanjutan.

Keywords: BUMDes, tata kelola kolaboratif, desa mandiri, IDM

ABSTRACT

Village development is a key agenda in Indonesia's national policy, as emphasized in Law No. 6/2014 on Villages. The Village Development Index (VDI), which integrates the Social Resilience Index (SRI), Economic Resilience Index (ERI), and Environmental Resilience Index (ERI_v), functions as a critical benchmark for assessing village independence. This study investigates the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) within a collaborative governance framework as an instrument to enhance rural economic resilience and accelerate the achievement of independent villages in Sabbangparu District, Wajo Regency. A qualitative case study approach was employed, drawing on interviews, observations, and document analysis. Respondents included village authorities, BUMDes managers, community leaders, and local residents. Data were analyzed descriptively and comparatively across VDI dimensions to capture variations among villages. The findings highlight that BUMDes contribute significantly to strengthening the rural economy by fostering local enterprises, generating employment, and expanding income sources. However, barriers such as limited managerial skills, low innovation capacity, weak external collaboration, and insufficient community participation remain evident. At the same time, several strategic opportunities exist, including untapped local economic potential in agriculture, fisheries, and crafts; strong social capital rooted in mutual cooperation; institutional and financial support under the Village Law; mentoring programs from government and NGOs; and increasing youth engagement in digital-based entrepreneurship. Comparative analysis further indicates that independent villages are characterized by stronger economic resilience, whereas developing villages remain constrained by weaker ERI despite adequate social and environmental resilience.

Overall, enhancing BUMDes capacity, strengthening community participation, and fostering cross-sectoral collaboration are essential strategies to accelerate sustainable independent village development.

Keywords: BUMDes, collaborative governance, village independence, rural economy, Village Development Index (VDI)

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan kemandirian desa sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa, pemerintah menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan IDM, desa dikategorikan mulai dari sangat tertinggal hingga mandiri. Desa mandiri diharapkan mampu menjadi lokomotif pembangunan daerah karena dinilai memiliki kapasitas dalam mengelola potensi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing wilayah (Muhtarom & Purwanti, 2018).

Meskipun terdapat perkembangan menuju kemandirian desa secara nasional, implementasinya masih belum merata. Kabupaten Wajo, misalnya, memiliki 142 desa dengan status perkembangan yang beragam, namun sebagian besar belum mencapai kategori mandiri. Khusus di Kecamatan Sabbangparu, dari 15 desa/kelurahan yang ada, hanya Desa Pasaka yang berhasil mencapai status mandiri dengan nilai IDM tertinggi, sementara desa-desa lainnya masih berada pada kategori maju. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan capaian pembangunan, di mana ketahanan sosial dan lingkungan relatif baik, tetapi ketahanan ekonomi (IKE) masih menjadi hambatan utama.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat basis ekonomi desa, salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, sebagian besar desa belum mampu mengoptimalkan peran BUMDes akibat keterbatasan inovasi usaha, rendahnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Padahal, penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya tata kelola BUMDes yang efektif. Wardani et al. (2021) menekankan bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes serta dukungan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan ekonomi desa (Wardani & Subina, 2023).

Berbagai studi juga menyoroti bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial di tingkat lokal. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga aktivitas ekonomi desa dapat berjalan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, lemahnya jejaring kemitraan, dan minimnya inovasi berbasis potensi lokal sering kali menjadi hambatan utama. Penelitian di Kabupaten Sigi menemukan bahwa keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes berpengaruh terhadap pelaksanaan operasional yang kurang optimal (Nuraisyah & Haryono, 2022). Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan seperti kepemimpinan dan kewirausahaan digital sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pengelola.

Pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi relevan untuk mengatasi persoalan tersebut karena mampu mempertemukan berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta, dalam mendukung keberlangsungan BUMDes (Dibyorini et al., 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip *collaborative governance* yang menekankan partisipasi aktif, komunikasi terbuka, serta pembagian peran yang proporsional di antara para pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Dengan demikian, BUMDes dapat bertransformasi dari sekadar unit usaha desa menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis kemandirian dan keberlanjutan.

Dalam kerangka tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), (Ansell & Gash, 2008) menekankan empat indikator utama keberhasilan kolaborasi, yaitu: (1) kondisi awal (*starting conditions*) yang mencakup tingkat kepercayaan, keseimbangan sumber daya, dan insentif partisipasi; (2) desain kelembagaan (*institutional design*) berupa aturan main yang jelas dan inklusif; (3) kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) yang mampu menjembatani kepentingan antar aktor; serta (4) proses kolaboratif (*collaborative process*) yang ditandai oleh dialog, pembangunan kepercayaan, saling pengertian, dan pencapaian hasil bersama (Kesumaningsih & Aigistina; Amalia, 2023). Dalam konteks desa, indikator ini dapat diaplikasikan dalam pengelolaan BUMDes, sehingga pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama secara efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Selain itu, teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan Arnstein (1969) menegaskan bahwa keterlibatan warga pada berbagai tingkat, mulai dari konsultasi hingga pengambilan keputusan, berperan penting bagi keberlanjutan program pembangunan, termasuk dalam pengelolaan BUMDes (Arnstein, 1969). Dengan demikian, kolaborasi multipihak dan partisipasi aktif masyarakat menjadi prasyarat utama untuk mempercepat pencapaian desa mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi instrumen penting untuk menilai capaian pembangunan desa, dan penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi (IKE) merupakan faktor kunci dalam pencapaian desa mandiri. Namun, penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji kasus tunggal atau terbatas secara waktu, sehingga belum memberikan gambaran komparatif antar desa dengan karakteristik sosial-budaya yang serupa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis baru dengan mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menempatkan BUMDes dalam kerangka tata kelola kolaboratif berdasarkan indikator Ansell & Gash. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis peran BUMDes dalam tata kelola kolaboratif sebagai instrumen penggerak ekonomi desa untuk mendukung pencapaian desa mandiri di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi implementasi tata kelola kolaboratif melalui BUMDes dalam percepatan pencapaian desa mandiri di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola kolaboratif dalam penguatan BUMDes, khususnya dalam peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebagai salah satu dimensi utama pencapaian desa mandiri. sekaligus menjadi rujukan bagi kebijakan pembangunan desa di wilayah lain dengan karakteristik yang sejenis.

METODOLGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, bertujuan untuk memahami secara mendalam peran BUMDes dalam tata kelola kolaboratif sebagai instrumen penggerak ekonomi desa serta mengungkap faktor penghambat dan peluang yang memengaruhi implementasinya dalam mendukung pencapaian desa mandiri, khususnya pada peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan di setiap desa secara kontekstual. Unit analisis adalah desa/kelurahan di Kecamatan Sabbangparu, sedangkan unit informan mencakup perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam program pembangunan desa.

Rancangan penelitian bersifat deskriptif komparatif dengan menganalisis kesamaan dan perbedaan antar desa berdasarkan ketiga dimensi IDM: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Populasi penelitian mencakup seluruh 15 desa/kelurahan dengan sampel yang diambil secara purposive, mempertimbangkan status desa (mandiri atau maju) dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Informan utama terdiri dari perangkat desa, pengelola BUMDes, dan tokoh masyarakat di masing-masing desa. Bahan dan alat utama penelitian meliputi dokumen perencanaan desa, laporan BUMDes, dan data IDM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wajo, sedangkan alat penelitian mencakup pedoman wawancara, daftar observasi, dan lembar dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, pengelola BUMDes, dan tokoh masyarakat; observasi partisipatif terkait kegiatan ekonomi dan sosial desa; serta dokumentasi berupa laporan, catatan administrasi, dan data IDM. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif dan matriks sintesis, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis komparatif antar desa digunakan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan peluang percepatan pencapaian status desa mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran BUMDes dalam Tata Kelola Kolaboratif sebagai Penggerak Ekonomi Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Kecamatan Sabbangparu telah memainkan peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa. Peran tersebut tampak pada pengelolaan unit usaha berbasis potensi lokal, seperti perdagangan hasil pertanian, jasa simpan pinjam, dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, peran BUMDes tidak berdiri sendiri, melainkan terwujud melalui tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta pihak eksternal seperti lembaga keuangan dan dinas terkait.

Hal ini sejalan dengan teori Anshel tentang kolaborasi, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga oleh sejauh mana aktor-aktor yang terlibat mampu membangun sinergi, berbagi peran, serta menciptakan kepercayaan dan komitmen bersama. Dalam konteks ini, BUMDes menjadi “hub” kolaborasi yang menjembatani kepentingan pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi masuknya pihak swasta maupun lembaga eksternal.

Dengan adanya musyawarah desa (*musdes*) sebagai forum bersama, prinsip kolaborasi menurut Anshel terwujud dalam bentuk partisipasi kolektif, transparansi, serta tanggung jawab bersama dalam menentukan arah usaha BUMDes. Hal ini membuktikan bahwa BUMDes tidak sekadar lembaga ekonomi desa, tetapi juga instrumen tata kelola kolaboratif yang memperkuat basis sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebagai bagian dari pencapaian desa mandiri.

2. Faktor Penghambat dan pendukung Tata Kelola Kolaboratif melalui BUMDes

Analisis Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Wajo, khususnya dalam konteks Kecamatan Sabbangparu, mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes masih menjadi kendala utama dalam upaya mencapai status desa mandiri. Kendala tersebut mencakup terbatasnya inovasi, minimnya pemanfaatan potensi lokal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kolaborasi antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah kecamatan, sektor swasta, dan akademisi. Di samping itu, pendampingan pemerintah selama ini masih sporadis dan belum merata ke seluruh desa. Data capaian IDM Kabupaten Wajo menurut laporan per Juni 2024 mencatat hanya 24 desa dari total 142 desa (sekitar 16,9 %) yang telah mencapai status mandiri, sementara 101 desa berstatus maju dan 17 desa masih berada pada kategori berkembang (Kementerian Desa, 2024). Kondisi ini juga berlaku bagi desa-desa di Kecamatan Sabbangparu menegaskan bahwa optimalisasi peran BUMDes sebagai motor pembangunan ekonomi desa belum tercapai secara menyeluruh karena hambatan struktural dan kelembagaan.

Di sisi pengelolaan internal BUMDes, permasalahan semakin kompleks dengan rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengurus, khususnya dalam aspek manajemen usaha, akuntabilitas keuangan, dan inovasi produk. Keterbatasan modal usaha juga membuat BUMDes kesulitan memperluas unit usaha potensial (Amalia, 2021). Partisipasi masyarakat masih belum merata karena sebagian warga menganggap BUMDes sebagai milik pemerintah desa, bukan milik bersama. Minimnya koordinasi dengan pihak perbankan atau investor akibat keterbatasan akses informasi dan jejaring kemitraan juga menjadi penghambat yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme tata kelola kolaboratif dengan praktik di lapangan yang masih didominasi perangkat desa.

Di balik berbagai hambatan tersebut, penelitian ini juga menemukan sejumlah peluang strategis yang dapat mempercepat pencapaian desa mandiri. Potensi ekonomi lokal sangat besar, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, dan pengolahan hasil bumi, yang dapat dioptimalkan melalui inovasi usaha BUMDes. Kearifan lokal berupa budaya gotong royong juga dapat menjadi modal sosial yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan usaha desa.

Selain itu, dukungan regulasi melalui Undang-Undang Desa, ketersediaan dana desa, serta program pendampingan dari pemerintah daerah, Dinas PMD, maupun NGO membuka ruang bagi penguatan kelembagaan dan kapasitas manajerial BUMDes. Tren meningkatnya partisipasi generasi muda desa dalam kegiatan ekonomi kreatif berbasis digital, khususnya dalam pemasaran produk secara daring, juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing BUMDes di tingkat regional maupun nasional.

Dengan demikian, hambatan dan peluang ini memberikan gambaran bahwa pencapaian desa mandiri di Sabbangparu sangat bergantung pada sejauh mana desa mampu mengatasi kelemahan internal pengelolaan BUMDes sekaligus memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Integrasi antara inovasi usaha, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi multipihak merupakan kunci utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa menuju status mandiri.

4. Kontribusi terhadap Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa BUMDes yang aktif dan dikelola secara kolaboratif memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan IKE. Hal ini terlihat dari bertambahnya lapangan kerja di desa, meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta adanya distribusi keuntungan BUMDes yang digunakan kembali untuk pembangunan desa.

Desa dengan BUMDes yang sehat menunjukkan nilai IKE yang lebih baik dibandingkan desa dengan BUMDes yang tidak aktif. Artinya, keberadaan BUMDes berkolaborasi dengan masyarakat mampu memperkuat dimensi ekonomi desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM), sehingga mempercepat status desa menuju kategori mandiri.

5. Perbedaan Status IDM Antar Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan instrumen yang digunakan Kementerian Desa, PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa melalui tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Berdasarkan hasil pengukuran IDM, desa diklasifikasikan menjadi desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat data Indeks Desa Membangun (IDM) pada seluruh desa di Kecamatan Sabbangparu yang menunjukkan variasi capaian perkembangan desa. Data ini menjadi dasar untuk melihat lebih jauh kontribusi masing-masing dimensi IDM terhadap status kemandirian desa yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Data Indeks Desa Mandiri Kabupaten Wajo

No	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
1	LIU	0,7029	0,7667	0,8667	0,7787	MAJU
2	UGI	0,7143	0,5833	0,8667	0,7214	MAJU
3	UJUNGPERO	0,7714	0,5833	0,8667	0,7405	MAJU
4	WAGE	0,7657	0,65	0,8	0,7386	MAJU
5	WORONGNGE	0,7429	0,7167	0,8667	0,7754	MAJU
6	SALOTENGNGA	0,7143	0,6167	0,8667	0,7325	MAJU
7	PALLIMAE	0,7029	0,6	0,8667	0,7232	MAJU
8	MALLUSESALO	0,7086	0,6167	0,8667	0,7306	MAJU
9	PASAKA	0,9029	0,7667	0,9333	0,8676	MANDIRI
10	TADANGPALIE	0,6971	0,6167	0,8667	0,7268	MAJU
11	BENTENG LOMPOE	0,8	0,7	0,7333	0,7444	MAJU
12	BILA	0,7143	0,65	0,8667	0,7437	MAJU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 desa di Kecamatan Sabbangparu, hanya Desa Pasaka yang berhasil mencapai status mandiri, dengan nilai IDM 0,8676. Sementara itu, desa-desa lainnya, seperti Liu (0,7787), Ugi (0,7214), dan Ujungpero (0,7405), masih tergolong maju. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan capaian desa mandiri terutama ditentukan oleh ketahanan ekonomi (IKE), yang menjadi variabel kunci dalam meningkatkan nilai IDM secara keseluruhan.

Analisis per dimensi menunjukkan:

- IKS (Indeks Ketahanan Sosial): Secara umum, nilai IKS cukup tinggi, berkisar antara 0,6971 hingga 0,9029. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua desa memiliki kualitas sosial yang memadai, termasuk partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif.
- IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi): Variasi terbesar terjadi pada IKE, dengan nilai terendah 0,5833 (Ugi, Ujungpero) dan tertinggi 0,7667 (Pasaka). Faktor ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi desa menjadi hambatan utama bagi sebagian besar desa untuk mencapai status mandiri.
- IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan): Nilai IKL relatif stabil, berkisar antara 0,7333 hingga 0,9333, menandakan bahwa kondisi lingkungan desa secara umum mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hasil analisis perbandingan antar desa memperlihatkan bahwa desa yang telah mencapai status mandiri umumnya ditopang oleh nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang tinggi serta didukung oleh capaian Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang kuat. Sebaliknya, desa yang masih berada pada kategori maju menunjukkan bahwa meskipun aspek sosial dan lingkungan sudah cukup baik, kelemahan utama tetap terletak pada dimensi ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan menuju desa mandiri di Kecamatan Sabbangparu sebaiknya diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi, terutama melalui optimalisasi peran BUMDes dan peningkatan keterlibatan aktif masyarakat. Sementara itu, ketahanan sosial dan lingkungan yang telah berjalan baik perlu terus dijaga sebagai penopang keberlanjutan. Dengan strategi demikian, tata kelola desa dapat berjalan lebih adaptif, inovatif, dan berkesinambungan, serta berpotensi menjadi acuan pembangunan bagi wilayah lain dengan kondisi yang sepadan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dapat disimpulkan bahwa dari 15 desa/kelurahan, hanya Desa Pasaka yang mencapai status mandiri, sementara desa lainnya masih tergolong maju. Perbedaan utama terletak pada ketahanan ekonomi (IKE), yang menjadi faktor pembeda antara desa mandiri dan desa maju, sedangkan ketahanan sosial (IKS) dan lingkungan (IKL) relatif merata.

BUMDes berperan sebagai penggerak ekonomi desa yang efektif. Desa mandiri menunjukkan pengelolaan BUMDes yang profesional, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta. Sebaliknya, desa yang masih maju menghadapi keterbatasan manajerial, partisipasi masyarakat rendah, dan jaringan kerja sama terbatas, sehingga nilai IKE tetap rendah.

Faktor penghambat pencapaian desa mandiri meliputi keterbatasan inovasi usaha desa, partisipasi masyarakat yang belum optimal, kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terbatas, dan pendampingan pemerintah yang sporadis. Namun, terdapat peluang strategis berupa potensi ekonomi lokal, budaya gotong royong, dan dukungan program pendampingan dari pemerintah maupun lembaga swasta/NGO.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi disarankan untuk mempercepat pencapaian desa mandiri:

1. Peningkatan kapasitas BUMDes melalui pelatihan manajemen, inovasi produk lokal, dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.
3. Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi, untuk akses modal, pelatihan, dan pemasaran produk.

4. Pendampingan berkelanjutan dari pemerintah dan NGO, guna memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus menjaga ketahanan sosial dan lingkungan.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, desa-desa di Kecamatan Sabbangparu memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pencapaian status desa mandiri, sambil tetap mempertahankan kualitas sosial dan lingkungan yang sudah baik. Pendekatan ini dapat dijadikan model bagi wilayah lain dengan karakteristik sosial-budaya serupa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih khusus ditujukan kepada lembaga yang telah memfasilitasi penelitian ini, baik melalui dukungan administratif maupun penyediaan data yang relevan. Penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada para informan dan responden yang dengan penuh kesediaan berbagi pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh kedalaman data yang dibutuhkan. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada rekan sejawat yang telah memberikan masukan berharga selama proses penulisan berlangsung. Akhirnya, segala bantuan, kerja sama, dan dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga kontribusi semua pihak mendapat balasan yang sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. ; S. H. (2021). The Implementation of Village-Owned Enterprise Program. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 131–141.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Dibyorini, M. C. C. R., Sakina, A. W., Adiwirahayu, A., & Abida, M. (2024). Manifestasi Collaborative Governance: Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Islamic Management and Empowerment Journal*, 6(1), 47–66.
- Kementerian Desa, P. T. dan T. (2024). *Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024* (p. 6).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Jakarta 1 (2016). http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016
- Kesumaningsih, I., & Aigistina; Amalia, R. (2023). Collaborative Process for Preventing Violence Against Women and Children in Makassar City. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 79–92.
- Muhtarom, N. K., & Purwanti, E. (2018). Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Inovasi Pembangunan–Jurnal Kelitbangan*, 6(2), 179–190.
- Nuraisyah, N., & Haryono, D. (2022). Capacity building kelembagaan badan usaha milik desa(BUMDes). *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 513–522.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 18-April-2 45 (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wardani, S. M., & Subina, T. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Mandiri di Desa Gandon Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. *Jurnal Dwija Kusuma*, 11(1), 58–71.